

https://farid.ps/articles/how_israel_dodges_icc_jurisdiction/id.html

Bagaimana Israel Menghindari Yurisdiksi ICC

Bagaimana jika Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang ditugaskan untuk menuntut kejahatan terburuk di dunia, tidak berdaya menghadapi pengelakan licik suatu negara? Israel telah mengubah prinsip komplementaritas ICC menjadi perisai, menghalangi penyelidikan independen dengan penyelidikan palsu. Esai ini mengungkap bagaimana Israel memanfaatkan celah hukum ini, menerapkan sistem keadilan ganda yang mendukung pemukim kekerasan di atas warga Palestina yang tertindas, dan bersandar pada sanksi AS yang melumpuhkan hakim ICC melalui jaringan SWIFT, Mastercard/Visa, dan daftar larangan terbang. Pembantaian Hind Rajab dan petugas medis Rafah mengungkap kedalaman strategi ini, menuntut tindakan internasional yang mendesak.

Eksplorasi Prinsip Komplementaritas

Prinsip komplementaritas ICC, yang tertuang dalam Pasal 17 Statuta Roma, hanya mengizinkan intervensi ketika suatu negara “tidak mau atau tidak mampu” secara tulus menuntut kejahatan dalam yurisdiksinya. Israel dengan sinis memanfaatkan ketentuan ini dengan melakukan penyelidikan internal yang dangkal yang berfungsi sebagai kedok untuk menggagalkan pengawasan ICC. Pembantaian Hind Rajab pada Januari 2024 dan pembantaian petugas medis Rafah pada 23 Maret 2025 menjadi contoh taktik ini. Dalam kasus Hind Rajab, IDF awalnya menyangkal keterlibatan, mengklaim tidak ada pasukan di dekat lokasi di mana seorang gadis berusia 6 tahun dan keluarganya dibunuh oleh tembakan tank, dan ambulans yang dikirim untuk menyelamatkan mereka dihancurkan, menewaskan dua petugas medis. Baru setelah bukti video dan penyelidikan independen oleh Forensic Architecture membuktikan bahwa tank IDF bertanggung jawab, IDF mengakui “kesalahan”, namun tidak ada dakwaan pidana yang diajukan—hanya tinjauan awal yang membebaskan prajurit dari kesalahan. Demikian pula, dalam pembantaian Rafah, IDF secara keliru mengklaim bahwa kendaraan kemanusiaan “mencurigakan” dan terkait dengan Hamas, menewaskan 15 pekerja bantuan, termasuk staf PRCS dan PBB, dalam serangan bergaya eksekusi. Rekaman video kemudian membantah narasi ini, memaksa IDF untuk mengakui kesalahan, tetapi penyelidikan pada 20 April 2025 hanya menyimpulkan temuan “pelanggaran profesional”, mencopot seorang wakil komandan dan mendisiplinkan yang lain tanpa pertanggungjawaban pidana.

Penyelidikan ini tidak independen maupun ketat, bergantung pada kesaksian prajurit yang memihak diri sendiri sambil menolak bukti korban dan laporan hak asasi manusia. Pola IDF—meluncurkan 47 penyelidikan setelah Perang Gaza 2008-2009 dengan kurang dari 1% dakwaan—menegaskan ketidaktinginannya untuk menuntut secara tulus. Israel juga menantang otoritas ICC, mempersengketakan status kenegaraan Palestina meskipun aksesinya ke Statuta Roma pada 2015, sikap yang ditolak oleh Kamar Pra-Persidangan I pada 21 November 2024, ketika mengukuhkan yurisdiksi dan mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Netanyahu dan Gallant. Sanksi AS baru-baru ini terhadap hakim ICC, yang diumumkan pada 5 Juni 2025 oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio,

memperburuk pengelakan ini. Langkah-langkah ini, yang menargetkan hakim Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, dan Beti Hohler, memblokir aset AS dan memberlakukan larangan perjalanan, kemungkinan membekukan rekening bank mereka melalui jaringan SWIFT dan menangguhkan layanan Mastercard/Visa, seperti yang terlihat pada akses terganggu Jaksa Khan. Dukungan AS ini, yang berakar pada klaim kedaulatan, menunda prosedur ICC, mengukuhkan pengelakan Israel sebagai penyalahgunaan komplementaritas yang disengaja untuk menghindari keadilan atas kekejaman yang terdokumentasi.

Standar Yudisial yang Berbeda: Palestina vs Pemukim Kekerasan

Sistem peradilan Israel berfungsi sebagai alat penindasan, memberlakukan rezim hukum ganda yang melanggar mandat Konvensi Jenewa Keempat untuk perlindungan yang setara di wilayah pendudukan. Warga Palestina, termasuk anak-anak berusia 12 tahun, tunduk pada sistem pengadilan militer yang menghukum pelanggaran kecil seperti melempar batu dengan tindakan keras. Defense for Children Palestine melaporkan bahwa 500-700 anak ditahan setiap tahun, mengalami kekerasan, penahanan isolasi, dan pengakuan paksa tanpa perwakilan hukum, seperti yang didokumentasikan dalam laporan Human Rights Watch tahun 2015 tentang pelanggaran pasukan keamanan. Pada tahun 2022, 137 anak ditahan, dan pada 2023 terjadi lonjakan mematikan, termasuk pembunuhan anak di bawah umur oleh penembak jitu, menurut eksposé The Guardian tahun 2024. Kasus-kasus ini sering berakhir dengan penjara, melanggar Konvensi Hak Anak.

Sebaliknya, pemukim Israel yang melakukan kekerasan—lebih dari 700.000 di Tepi Barat—beroperasi di bawah hukum sipil, menikmati impunitas untuk perampasan tanah dan serangan. Laporan B'Tselem tahun 2021, "Rezim Supremasi Yahudi," merinci bagaimana pemukim, bersenjata dan didukung oleh pos-pos IDF, merebut lebih dari 50% tanah Tepi Barat melalui pembakaran, pemukulan, dan pembunuhan. Serangan pembakaran di Duma pada 2015, yang menewaskan sebuah keluarga Palestina, hanya menghasilkan satu pemukim dihukum setelah bertahun-tahun penundaan, sementara yang lain lolos dari keadilan. Laporan Addameer tahun 2023 mengkonfirmasi bahwa pengadilan militer mengecualikan pemukim, yang mendapat manfaat dari prosedur sipil yang lunak atau tidak ada sama sekali, dengan Mahkamah Agung menyetujui perampasan tanah sebagai tindakan "keamanan". Ketimpangan ini memperkuat sistem dominasi rasial, pelanggaran jelas terhadap definisi apartheid dalam Statuta Roma.

Studi Kasus: Pembantaian Hind Rajab dan Petugas Medis Rafah

Pembantaian Hind Rajab dan petugas medis Rafah adalah ilustrasi yang memberatkan dari taktik pengelakan Israel. Pada Januari 2024, Hind, seorang gadis berusia 6 tahun, dan keluarganya dibunuh oleh tembakan tank IDF di Kota Gaza, dan upaya penyelamatan ambulans juga diserang, menewaskan petugas medis Yousef Zeino dan Ahmed al-Madhoun. IDF berbohong, mengklaim tidak ada pasukan di lokasi, hingga penyelidikan Forensic Architecture pada 2024, yang didukung oleh bukti video dan audio, membuktikan sebaliknya, menunjukkan bahwa tank menembak dari jarak 13-23 meter. Tidak ada dakwaan pidana yang diajukan—prajurit dibebaskan dengan dalih "pelanggaran

profesional". Demikian pula, serangan Rafah pada 23 Maret 2025 menewaskan 15 pekerja bantuan, termasuk staf PRCS dan PBB, dalam serangan terhadap ambulans dan kendaraan PBB. IDF secara keliru mengklaim adanya hubungan dengan Hamas, tetapi bukti video dari ponsel seorang petugas medis mengungkap kebohongan tersebut, menunjukkan kendaraan di bawah tembakan dengan lampu menyala. Penyelidikan pada 20 April 2025 hanya menemukan "kegagalan profesional", mencopot seorang wakil komandan tanpa pertanggungjawaban pidana, meskipun otopsi mengkonfirmasi pembunuhan yang disengaja.

Kasus-kasus ini menyoroti pola Israel: berbohong hingga bukti tak terbantahkan muncul, lalu melakukan penyelidikan palsu untuk membebaskan pelaku, mengeksplorasi komplementaritas untuk memblokir yurisdiksi ICC. Sanksi AS terhadap hakim ICC, yang mengganggu kemampuan keuangan dan perjalanan mereka, semakin memperkuat impunitas ini, membuat pengadilan tidak mampu bertindak.

Dasar Hukum dan Implikasi Internasional

Tindakan Israel melanggar Konvensi Apartheid dan Statuta Roma, yang mendefinisikan apartheid sebagai penindasan sistematis oleh satu kelompok rasial terhadap kelompok lain. Laporan Human Rights Watch tahun 2021 dan Amnesty International tahun 2022 menyimpulkan bahwa kebijakan Israel memenuhi ambang ini, mengutip undang-undang diskriminatif, pembatasan pergerakan, dan pembunuhan. Pelapor Khusus PBB pada 2022 mengkonfirmasi apartheid di wilayah pendudukan, temuan yang ditolak Israel sebagai politis. Ketidakmampuan ICC untuk mengesampingkan penyelidikan palsu ini—meskipun ada surat perintah penahanan pada 2024—diperparah oleh sanksi AS. Jaringan SWIFT, di bawah yurisdiksi AS, memaksa bank global untuk membekukan rekening hakim, sementara Mastercard/Visa menangguhkan layanan kredit, dan penempatan di daftar larangan terbang membatasi perjalanan, seperti yang terlihat pada kasus Khan. ICC dan PBB mengutuk ini sebagai serangan terhadap keadilan, dengan UE mengusulkan undang-undang pemblokiran, namun pengelakan Israel terus berlanjut.

Pengelakan Israel dari yurisdiksi ICC adalah strategi yang terencana, menyalahgunakan komplementaritas untuk mempertahankan sistem hukum dua tingkat yang menindas warga Palestina sambil melindungi pemukim dan prajurit. Pembantaian Hind Rajab dan Rafah, dengan kebohongan yang terungkap dan pembebasan bersalah, bersama dengan sanksi AS yang melumpuhkan hakim ICC, adalah bukti tak terbantahkan dari rezim ini. Komunitas internasional harus bertindak—menuntut penyelidikan independen, memberlakukan sanksi balasan, dan menegakkan surat perintah penahanan ICC—untuk membongkar struktur mirip apartheid ini dan memberikan keadilan kepada para korban.